

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Abdul Kadir Muhammad. 2006. *Etika Profesi Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Hofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung. Mandar Maju.
- Budi Untung. 2015. *Karakter Pejabat Umum (Notaris Dan Ppat) Kunci Sukses Melayani*. Yogyakarta. Andi Offset.
- Charlie Rudyat. 2013. *Kamus Hukum*. Yogyakarta. Pustaka Mahardika.
- C.S.T. Kansil. 2012. *Pokok-Pokok Etika Propesi Hukum*. Jakarta. Pradya Pramita.
- Daeng Naja. 2012. *Teknik Pembuatan Akta*. Yogyakarta. Pustaka Yustisia.
- G.H.S Lumban Tobing. 1999. *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*. Jakarta. Erlangga.
- H.Salim HS. 2016. *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoretis, Kewenangan Notaris, Bentuk Dan Minuta Akta)*, Cet 2 Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- HR Ridwan. 2011. *Hukum Adminstrasi Negara*. Jakarta. Rajawali pers.
- Habib Adjie. 2011. *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*. Bandung. Refika Aditama.
- _____. 2008. *Meneropong Khazanah Notaris Dan PPAT Indonesia*. Surabaya. Citra Adtya Bakti.
- Inu Kencana Syafi'i. 2010. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung. PT. Refika Aditama.
- Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan. 2009. *Ke Notaris. Raih Asa Sukses*. Jakarta. Rajawalipers.
- Kartini Muljadi. 2006. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta. Kencana.
- Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko. 2010. *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum, Pustaka Yustisia*. Yogyakarta. PT. Gramedia.

Liliana Tedjosaputro. 1995. *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakkan Hukum Pidana*. Yogyakarta. Bigraf Publisng.

M Yahya Harahap. 2010. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta. Sinar Grafika.

Munir Fuady. 2001. *Hukum Kontrak (dari sudut pandang Hukum Bisnis)*. Bandung. Citra Aditya Bakti.

Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Media Grup.

_____. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Penerbit Kencana.

R. Soegondo Notodisoerjo. 1993. *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

Sjaifurrachman dan Habib Adjie. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Bandung. Mandar Maju.

Sri Mamudji. 2007. *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Jakarta. Badan Penerbit Penulis Universitas Indonesia.

Sudikno Mertokusumo. 2009. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta. Liberty.

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. 1993. *Bab Bab Tentang Penemuan Hukum*. Yogyakarta. PT. Citra Aditya Bakti.

Subekti. 2018. *Hukum Pembuktian*. Jakarta. PT Balai Pustaka.

Sutan Remy Sjahdeini,. 1993. *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Jakarta. Institut Bankir Indonesia.

JURNAL

Bahder Johan Nasution. 2020. Penerapan Sanksi Administratif Sebagai Sarana Pengendali Pembatasan Terhadap Pembatasan Bertindak Bagi Notaris. *Jurnal Recital Review Vol. 2 No. 1*. Fakultas Hukum Universitas Jambi.

Hasanuddin Kusuma Negara. 2017. Kewenangan Pembuatan Akta Bagi Notaris yang Berada di Daerah Provinsi Hasil Pemekaran. *Jurnal Transparansi Hukum Vol. 1 No. 2*. Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya.

- Heni Kartikosari. Rusdianto Sesung. 2017. Pembatasan Jumlah Pembuatan Akta Notaris Oleh Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Noatris Indonesia. *Jurnal Al'adi Vo. IX No. 2* . Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya.
- Laily Nur Azizah. Rusdianto Sesung. 2017. Relevansi Pembatasan Pembuatan Akta Notaris Terhadap Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum. *Jurnal Transparansi Hukum Vol. 1 No. 2*. Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya.
- Pratiwi Ayuningtyas. 2020. Sanksi Terhadap Notaris Dalam Melanggar Kode Etik. *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 9 No. 2*. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.
- Philipus M. Hadjon. 1996. *Penegakkan Hukum Administrasi dalam Kaitannya dengan Ketentuan Pasal 20 Ayat (3) dan (4) UU No. 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup*", Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, No. 1.
- Tasya Anindita. 2017. Analisis Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris Sebagai Pejabat Umum di Kota Medan. *Jurnal Porta Garuda Vol. 2 No. 1*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.
- Deva Apriza, "Limitasi Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Palembang Dalam Penangan Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Notaris," *Repertorium* 7, no. 1 (2018): 31–42.

SUMBER PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UUD Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Kode Etik Notaris.

Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Nomor 1 Tahun 2017.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C- 18.HT.01.06 Tahun 2006 tentang Perubahan AD-ART INI